ISSN: 1693-7368
ISSN elektronik: 1907-9281
<http://www.geocities.com/jurnalpend>

JURNAL PENELITIAN

BIDANG ILMU PERTANIAN

Vol. 12 No. 1 April 2014

BIDANG ILMU PERTANIAN
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH-I
(NAD-SUMATERA UTARA)

Pembina:

Djohar Arifin, Ir., Dr., Prof. (Kopertis Wil. I)
H. OK Nazaruddin Hisyam, Ir., MS. (USU)
Darma Bakti, Ir., MS., Dr., Prof. (USU)
Bungaran Saragih, Ir., M.Ec., Dr., Prof. (IPB)
Iswandi Anas, Dr. (IPB)
Budi Mulyanto, Ir., Dr. (IPB)
Nurita Taruan, Ir., Dr., (Balai Penelitian Perkebunan Bogor)
Koordinator Kopertis Wilayah I
Sekretaris Kopertis Wilayah I

Penanggung Jawab

Basyaruddin, Ir., MS., Dr., Prof.

Ketua Dewan Redaksi

Biliter A. Sirait, Ir., MS., Dr. Prof.

Redaksi Pelaksana

Try Koryati, Ir., MP.
Magdalena Saragih, Ir., MP.
M. Buchari Sibuea, Ir., MP.

Anggota Redaksi

Meizal, Ir., MS.
Erfan Wahyudi, Ir., MP.
Armaniar, Ir., MP.
Noverita SV, Ir., MP.
Nurhayati, Ir., MP., Dr.
Wan Arfiani Barus, Ir., MP.
M. Idris, Ir., MP., Dr.
Zuhrawardi, Ir., MP.
Nurdin Sitohang, Ir., MP.

Penerbit

Bidang Ilmu Pertanian Kopertis Wilayah I

Alamat Redaksi

Jalan Setia Budi Gg. Sempurna T. Sari Medan
Telepon: (061) 8214878, E-mail: dapejel@yahoo.com

Pencetak

USU Press

Gedung F Jl. Universitas No. 9 Kampus USU, Medan, Indonesia
Telp: (061) 821 3737, Fax: (061) 821 3737

JURNAL PENELITIAN BIDANG ILMU PERTANIAN

Volume 12, Nomor 1, April 2014

ISSN: 1693-7368

ISSN elektronik: 1907-9281

<http://www.usupress.usu.ac.id/jurnalpend>

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Penguatan Ketahanan Pangan Melalui Teknik Budidaya System of Rice Intensification (SRI) di Serdang Bedagai Biliter Sirait	1
IBM Kelompok Tani Padi Sawah Tadah Hujan di Lubuk Pakam Noverita Sprinse Vinolina, Rolan Siregar, Marulak Siahaan	7
The Test of Viability and Vigority Seed of Rice Ramos Adaptive Local Deli Serdang with Various Levels of Dose Irradiation Gamma Rays in The Seedbed Sri Utami	13
Uji Efektifitas Ekstrak Daun Pepaya (<i>Carica papaya</i> L.) Terhadap Hama <i>Plutella xylostella</i> L. (Lepidoptera : Plutellidae) di Laboratorium Aldywaridha, Syamsafitri dan Heri Syahfrial	17
Pengaruh Tingkat Kemasakan Buah dan Periode Simpan Terhadap Vigor Benih Kakao (<i>Theobroma cacao</i> L.) Bukhari	24
Pengembangan Teknik Konservasi <i>Chaetoxorista</i> sp (Diptera) dan <i>Trychogramma</i> sp (Hymenoptera) Sebagai Agens Pengendali Hama Ulat Pemakan Daun dalam Rangka Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Ramah Lingkungan Retno Astuti Kuswardani, Maimunah dan Sartini	33
Konsep Land dan Tree Tenure Berbasis Dalihan Na Tolu pada Tanah Masyarakat di Desa Sigalangan, Tapanuli Selatan Tri Martial	40
Estimasi Fungsi Permintaan dan Trend Ekspor Hasil Perkebunan Indonesia Cyprianus PH Saragi	48

KONSEP LAND DAN TREE TENURE BERBASIS DALIHAN NA TOLU PADA TANAH MASYARAKAT DI DESA SIGALANGAN, TAPANULI SELATAN

Tri Martial

Fakultas Pertanian Universitas Islam Sumatera Utara (UISU)
Jl. Karya Bhakti No. 34 Medan, Email: trimartial@gmail.com

ABSTRACT

The study aims is to develop the land and tree tenure concept on public land at Sigalangan village, South Tapanuli with custom base Dalihan na tolu. This study may provide the basis for constructing a system of incentives within planting trees by the community. The method used is to determine the land and tree tenure rights refers to the Rapid appraisal of social forestry for land and tree tenure. This method is used to determine the pattern of land and tree tenure prevailing in society. Land and tree tenure security observed by the people's rights in the land and tree. The results illustrate that there are arrangements by local custom institutions as Dalihan na tolu in land and tree tenure systems. The types of plants chosen especially for economic needs of farmers. Local customs often play a role in strengthening property rights, and resolve of land use conflicts. With Dalihan na tolu encourages the benefit of land owners rather than common interests.

Keywords : Land ownership, trees, local custom , Dalihan na tolu , Sigalangan

I. PENDAHULUAN

Kerusakan hutan dan lahan saat ini memicu program penanaman pohon secara massive oleh pemerintah. Kegiatan ini dilakukan baik dilahan-lahan negara maupun lahan masyarakat. Namun hal ini menimbulkan pertanyaan apakah penanaman pohon ini akan berkelanjutan termasuk dengan pemeliharannya? Banyak bukti yang menunjukkan petani atau masyarakat cenderung menghindari penanaman pohon sebab tidak jelas terhadap siapa yang akan mendapatkan manfaat dari pohon nantinya. Bahkan program-program penanaman pohon setelah menanam kemudian ditelantarkan dan tidak dipelihara. Hal ini beberapa kasus dapat dilihat di sepanjang sungai Deli dimana bibit-bibit pohon setelah ditanam dalam program penanaman pohon selanjutnya tidak dirawat dan tidak ada yang bertanggung jawab terhadap pohon-pohon tersebut. Hal ini membuktikan ketidakjelasan hak-hak penguasaan pohon berdampak buruk terhadap pengelolaan pohon.

Penguasaan pohon (*tree tenure*) adalah hak-hak kepemilikan, pemanfaatan dan kontrol pada pohon. Pemanfaatan disini adalah hak-hak untuk memanfaatkan pohon sebagai sumber pendapatan petani. Ketika hak-hak ini tidak jelas

didapatkan maka petani akan menghindari menanam pohon. Jadi dapat dikatakan program-program penanaman pohon tanpa kejelasan sistem *tree tenure* buat mereka maka hal ini hanya merupakan tindakan sporadic saja atau tidak berkelanjutan dalam jangka panjang.

Secara teoritis hak-hak penguasaan ini umumnya dilihat dalam hak-hak perorangan, bahkan sistem komunal seringkali dianggap sebagai penghambat dalam investasi ke lahan dalam bentuk penanaman pohon. Beberapa literatur menyebutkan bahkan kepemilikan komunal pada kondisi tertentu mampu untuk mengelola sumber daya mereka sendiri (*self governance*) (Agrawal, 2001; Ostrom, 1999). Hal ini menunjukkan bahwa inisiatif lokal dapat mendukung pengelolaan sumber daya mereka dengan baik jika ditata dalam sistem kelembagaan lokal yang diterima oleh masyarakat tersebut.

Dari hasil penelitian penulis di Sumatera Barat, penguasaan pohon ternyata menunjukkan status yang spesifik sesuai dengan adat dan kepentingan secara lokal. Penataan sistem penguasaan pohon yang tepat akan menjadi sistem insentif bagi petani untuk menanam pohon di lahan-lahan mereka sendiri. Keterlibatan masyarakat lokal dalam kelembagaan penguasaan pohon (*tree tenure*)

ternyata dapat memperkuat jaminan keamanan penguasaan oleh individual. Dengan pranata adat *dalihan na tolu* di Sumatera Utara yang berbeda dengan adat Minangkabau di Sumatera Barat, maka konsep *tree tenure* berbasis *dalihan na tolu* diduga merupakan gambaran yang juga spesifik sesuai dengan aturan masyarakat adat *dalihan na tolu* di Sumatera Utara.

Untuk itulah dalam penelitian ini konsep *tree tenure* berbasis *dalihan na tolu* yang ingin ditemukan merupakan kontribusi yang penting dalam pengelolaan sumber daya khususnya pohon untuk mendorong keberlanjutan pengelolaan nantinya. Konsep ini dapat menjadi dasar dalam pengelolaan sumber daya pohon oleh masyarakat dengan memberikan kejelasan hak-hak mereka sebagai dasar untuk membangun sistem insentif dalam menanam dan memelihara pohon, dimana selama ini yang terjadi di masyarakat adalah kecenderungan untuk menebang dan bukan menanam pohon.

Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimanakan konsep pranata adat *dalihan na tolu* dalam sistem penguasaan tanah dan pohon di tanah masyarakat Sigalangan, Tapanuli Selatan?

II. TINJAUAN PUSTAKA

Program rehabilitasi lahan dan hutan berupa penanaman pohon pada lahan-lahan masyarakat sudah banyak dilakukan akhir-akhir ini. Namun sejauh mana keberhasilan program ini masih menjadi pertanyaan. Beberapa kasus justru menunjukkan setelah penanaman pohon tidak dilanjutkan dengan pemeliharaan oleh masyarakat. Lemahnya hak-hak pada pohon seringkali menjadi pokok permasalahan tersebut di atas. Ketidakjelasan terhadap siapa yang akan memanfaatkan hasil pohonnya nanti berdampak enggan masyarakat memelihara pohon (Diaz, 2003). Oleh sebab itu perlu konseptualisasi terhadap sistem *tree tenure* tersebut yang dapat dijadikan dasar bagi membangun sistem insentif untuk menanam dan memelihara pohon.

Pengertian Kelembagaan Penguasaan Lahan dan Pohon

Menurut Hayami dan Ruttan (1984), kelembagaan dimaknai sebagai sistem nilai atau seperangkat aturan yang berlaku pada masyarakat atau organisasi untuk mempermudah koordinasi antara orang-orang dalam

memperoleh harapan mereka masing-masing secara layak. Kategori aturan-aturan ini berkaitan dengan penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*). Terdapat dua jenis aturan yaitu *formal-non formal* dan *working-non working*.

Berdasarkan pengertian di atas secara teoritis kelembagaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini bermakna sebagai aturan main dan organisasi, walaupun tidak selamanya organisasi dapat disebut kelembagaan. Kelembagaan yang baik akan menjamin keberlangsungan sistem dengan baik dan akhirnya merupakan jaminan keberhasilan pembangunan sebagai dinamika internal dari komunitas (lokal) (Pasandaran, 2004).

Pengertian penguasaan (*tenure*) menurut Bruce (1998) adalah satu set hak-hak dimana seseorang atau beberapa kelompok pribadi atau publik memiliki lahan. *Tenure* sebagai satu set hak-hak secara khusus berkombinasi atau satu kelompok hak-hak terhadap yang ditentukan oleh hukum dan kebiasaan dalam masyarakat tertentu. Secara khusus hal ini juga dinamai dengan kepemilikan atau penggunaan hasil (*usufruct*).

Suatu sistem penguasaan sebenarnya merupakan suatu set hak-hak penguasaan pada masyarakat tertentu. Jadi sistem penguasaan ini dapat berbeda antar masyarakat yang berbeda. Biasanya selalu terdapat berbagai macam bentuk *tenure* dalam suatu sistem *tenure* dengan berbagai sistem penggunaan atau berbagai tipe pengguna. Hal ini merupakan suatu hal yang koheren atau saling melengkapi satu sama lain. Berdasar di atas, kelembagaan penguasaan lahan (*land tenure*) dan penguasaan pohon (*tree tenure*) dimaksudkan sebagai aturan main yang berlaku dalam sistem penguasaan lahan dan pohon.

Menurut La Croix (2002) penguasaan lahan ini dapat dikategorikan kepada tiga dimensi, (1) ada atau tidaknya status kepemilikan formal sebagai hak milik yang diakui oleh hukum negara, (2) tingkat hak kepemilikan berdasarkan kontrak untuk menggunakan lahan, dan (3) spektrum dari hak kepemilikan private-komunal pada lahan. Pada satu sudut (*private*) kebebasan pemilikan dengan status jelas, terus menerus, dapat diwariskan dan kemandirian lahan, sering telah diregistrasi oleh negara dengan disertai kewajiban tertentu. Pada sisi lain menempatkan lahan secara temporer untuk dimanfaatkan pada lahan komunal. Keberadaan penguasaan lahan

ini dapat berubah oleh berbagai faktor seperti harga-harga, kebijakan pemerintah, kecenderungan petani dan pemilik lahan dan teknologi. Penguasaan lahan adalah bentuk legal yang berarti hak penguasaan pada lahan dan pohon atau kontraktual atau kebiasaan dimana orang-orang dalam usaha tani mendapatkan akses terhadap keuntungan produktif pada lahan.

Keamanan *tenure* menurut Bruce (1998) dapat diindikasikan bahwa negara ataupun pribadi yang lain tidak dapat mencampuri pemanfaatan lahan oleh pemilik lahan. Penguasaan bisa saja singkat, misal disewa dalam jangka satu bulan, tetapi penyewa dapat secara pasti menguasai lahan tersebut selama jangka waktu yang disepakati yang menggambarkan keyakinan terhadap sistem legal sehingga tidak ada keraguan terhadap kehilangan haknya. Elemen lain adalah lama waktu penguasaan (durasi). Jika penguasaan terlalu singkat misal satu tahun maka akan menyulitkan dalam pengembalian investasi yang diberikan ke lahan. Misalnya petani tidak akan menanam pohon karena tidak ada dugaan keamanan untuk menggunakan kayunya nanti. Elemen ketiga adalah persyaratan hak penuh pada lahan. Walaupun lahan dapat dimiliki seumur hidup tetapi tetap tidak aman jika tidak dapat diwariskan atau dijual. Jadi disini dikatakan aman adalah jika hak kepemilikan secara penuh dimiliki.

Kelembagaan Adat Lokal

Kelembagaan sebagai sistem aturan dan organisasi mempunyai kekuatan dalam klaim sumberdaya alam. Kelembagaan lokal ini mencerminkan hubungan kekuasaan lokal (*power relation*) yang mempengaruhi pengaturan hak kepemilikan (*property right*) termasuk sistem kelembagaan penguasaan lahan (Meinzen-Dick et al, (2004).

Kekuasaan lokal pada masyarakat menurut Tjondronegoro (1998) digambarkan oleh kelembagaan desa, tata pemerintahan dan pola tata desa. Menurutnya kemandirian kelembagaan desa yang terlalu erat kaitannya dengan gugus pamong atau kepemimpinan formal tidak akan mendorong prakarsa setempat. Oleh sebab itu dapat disebutkan bahwa keberadaan sistem penguasaan pohon dan lahan tidak akan eksis jika kelembagaan lokal tidak mampu secara mandiri melaksanakan aturan-aturannya sehubungan dengan klaim

yang menguatkan hak-hak anggota masyarakat pengguna sumberdaya tersebut. Hubungan kekuatan lokal dengan sistem tenurial ini tampak pada Gambar 1.

Keanggotaan masyarakat dalam sebuah organisasi sosial akan mendorong untuk mengatasi kesulitan dalam hidupnya, juga berarti bahwa ketiadaan dukungan organisasi akan membuat seseorang kesulitan untuk menggunakan berbagai akses (Abdullah, 2001), seperti misalnya pada *land* dan *tree tenure*. Organisasi sering menjadi sumber informasi karena menghubungkan sebuah keluarga dengan lembaga di luarnya. Hal ini juga pada sisi lain menimbulkan struktur ketergantungan yang bersifat eksploitatif antar orang atau kelompok.

Gambar 1. Hubungan kekuatan lokal dengan sistem tenurial
(Sumber: Tjondronegoro, 1998)

Distribusi kekuasaan lokal berpengaruh pada produktivitas sistem *tenure* suatu daerah baik melalui insentif dimana *tenure* diatur untuk partisipasi efektif dari pekerja, manajer, investor dan lain-lain. Sistem *tenure* menjadi persyaratan ekonomi bagi adopsi teknologi baru, perubahan ukuran lahan dan persamaan pendapatan tenaga kerja antara pertanian dengan sektor lainnya.

III. METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengobservasi bentuk-bentuk penguasaan lahan dan pohon serta dasar terbentuknya. Gambaran status penguasaan lahan dan pohon akan memberikan insentif bagi pengelolaan pohon di lahan-lahan masyarakat, hal ini ditunjukkan oleh tingkat keamanan hak-hak penguasaan masyarakat pada pohon. Dalam penelitian ini menggunakan strategi pendekatan sebagai berikut: Pertama penelitian melakukan observasi untuk menggambarkan pola penguasaan lahan dan pohon yang meliputi kepemilikan, akses dan kontrol pada lahan dan pohon.

Kedua melakukan observasi terhadap tatanan adat *dalihan na tolu* dalam hubungannya dengan penguasaan lahan dan pohon. Kelembagaan adat lokal digambarkan dalam bentuk dan fungsinya sehubungan dengan penguasaan.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Sigalangan, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan. Lokasi dipilih secara *purposive* berdasarkan bahwa di Desa tersebut basis adat *dalihan na tolu* atau daerah *bona bulu* (Persadaan Marga Harahap, 1993). Penelitian akan dilakukan di Periode April 2012 sampai Oktober 2012.

Survey pendahuluan dilakukan tentang keadaan wilayah yang akan diteliti menyangkut pranata adat *dalihan na tolu*, kondisi geografis, pemanfaatan lahan dan jenis-jenis tanaman/pohon yang dibudidayakan masyarakat. Berdasarkan hasil survey awal ditentukan desa (*huta*) yang akan dijadikan desa sampel di setiap Kabupaten untuk diteliti.

Sesuai dengan tujuan penelitian untuk mengobservasi *tree tenure* berbasis *dalihan na tolu*, maka pemilihan sampel ditentukan berdasarkan unsur-unsur pranata adat *dalihan na tolu*, yaitu *kahanggi*, *anak boru*, *mora* dan *hatobangan*.

Data dan Sumber Data

Data-data dan sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Data-data primer yang didapatkan secara langsung di lapangan maupun dari responden adalah Hak-hak penguasaan lahan dan pohon yang meliputi kepemilikan, pemanfaatan dan control, profil pemanfaatan lahan yang didapatkan dari pengamatan langsung serta dari responden, jenis-jenis vegetasi tanaman yang dibudidayakan oleh masyarakat termasuk pohon, dan kelembagaan adat lokal, yaitu bentuk dan struktur lembaga serta fungsinya.

Data-data sekunder yang didapatkan dari lembaga desa dan instansi terkait, yaitu kondisi fisik wilayah penelitian yang meliputi letak dan luas wilayah, keadaan lahan dan fisiografi, topografi dan elevasi, tata guna lahan, iklim setempat dan kawasan hutan; demografi wilayah menyangkut struktur masyarakat, yaitu penduduk, pekerjaan, pendidikan, dan lain-lain.

Metode dan Instrumen pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah: observasi, yang dilakukan sebelum pengumpulan data dari responden. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang kondisi wilayah penelitian. Daftar pertanyaan dibuat untuk mengarahkan pernyataan responden sesuai dengan tujuan penelitian.

Analisis Data

Analisis dilakukan secara deskriptif untuk membangun dan menjelaskan terhadap pola penguasaan lahan dan pohon di lahan masyarakat. Sajian secara deskriptif ini didukung oleh data-data kuantitatif yang dianalisa berdasarkan status penguasaan lahan dan pohon. Selain itu juga pola penguasaan lahan dan pohon dijelaskan hubungannya dengan peranan kelembagaan adat lokal. Analisis pola penguasaan lahan dan pohon ini mengacu kepada teori hak kepemilikan (*property right regime*) termasuk kepada akses, pemanfaatan dan manajemen/ kontrol pada lahan dan pohon.

Bentuk dan peranan kelembagaan adat lokal sehubungan dengan penguasaan lahan dan pohon dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Peranan kelembagaan lokal berdasarkan bentuk, struktur dan fungsi lembaga sehubungan dengan penguasaan lahan dan pohon.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Wilayah Studi

Areal studi dilakukan di Desa Sigalangan Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan. Basis tanaman di sini umumnya adalah agroforestri dengan tanaman utama kakao, sehingga disebutkan sebagai agroforestri kakao. Kabupaten Tapanuli Selatan terletak pada garis $0^{\circ}58'35''$ - $2^{\circ}07'33''$ Lintang Utara dan $98^{\circ}42'50''$ - $99^{\circ}34'16''$ Bujur Timur. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Tapanuli Utara. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara. Sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Mandailing Natal. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Mandailing Natal dan juga Samudera Indonesia.

Luas wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah 4,367.05 Km². Sedangkan ketinggiannya berkisar antara 0 - 1.925,3 m

diatas permukaan laut. Jika dilihat dari luas daerahnya, luas Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sekitar 4,367.05 (Km2). Batang Angkola sendiri seluas 474,70 Km2 atau sekitar 10,87 % luas Kabupaten Tapanuli Selatan (Tabel 1).

Tabel 1. Luas wilayah Kecamatan Batang Angkola di Tapanuli Selatan

Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Distribusi Luas (%)
1. Batang Angkola	474,70	10,87
2. Sayurmatangi	376,55	8,62
3. Angkola Timur	286,40	6,56
4. Angkola Selatan	225,31	5,16
5. Angkola Barat	194,60	4,46
6. Batang Toru	351,49	8,05
7. Marancar	86,88	1,99
8. Sipirok	557,26	12,76
9. Arse	248,75	5,70
10. Saipar Dolok Hale	474,13	10,86
11. Aek Bilah	327,17	7,49
12. Muara Batang Toru	273,13	6,25
13. Tano Tambangan Angkola	195,68	4,48
14. Angkola Sangkunar	295,00	6,76
Total	4.367,05	100,00

Curah hujan di Kabupaten Tapanuli Selatan cenderung tidak teratur di sepanjang tahunnya. Pada Bulan Maret terjadi curah hujan tertinggi (1,508 mm). Sedangkan hari hujan terbanyak terjadi di Bulan November yaitu 22 hari.

Sedangkan Jumlah penduduk di Batang Angkola adalah 32 129 orang atau sekitar 12,18 % dari jumlah penduduk kabupaten Tapanuli Selatan. Sebanyak 81,60 % angkatan kerja di Tapanuli Selatan bekerja dibidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan.

Penggunaan lahan di Tapanuli Selatan tahun 2010 adalah pada Tabel berikut.

Tabel 2. Kondisi Penggunaan Tanah di Kabupaten Tapanuli Selatan 2010 (Ha)

No.	Pemanfaatan	Luas
1	Lahan Sawah	2 689
2	Pekarangan dan Bangunan	500
3	Tegal /Kebun	380
4	Ladang / Huma	70
5	Penggembalaan	162
6	Rawa Tidak Ditanami	2 458
7	Tambak	-
8	Kolam / Tebat / Empang	71
9	Sementara Tidak Ditanami/	-
	Jumlah	6 330

Dari sini dapat digambarkan bahwa Desa Sigalangan sebagai bagian dari wilayah Tapanuli Selatan adalah termasuk etnis Mandailing-Angkola. Mayoritas masyarakatnya beragama Islam dan bekerja sebagai petani. Model sistem pertanian beragam dari lahan basah dan lahan kering, namun sistem pertanian didominasi oleh lahan sawah. Tanaman perkebunan rakyat didominasi oleh sistem agroforestri sebagai bentuk pencampuran beberapa tanaman tanuhan, seperti kakao, sawit, karet dan kelapa. Areal agroforestri terdapat di sekeliling Desa Sigalangan, dengan pengelolaan umumnya dilakukan secara tradisional dengan pemeliharaan seadanya.

Kelembagaan Penguasaan Lahan dan Pohon

Kelembagaan penguasaan lahan dan pohon merupakan kepemilikan, dalam hal ini status kepemilikan, luas lahan, dan hak-hak atas lahan dan pohon. Pemanfaatan merupakan hak-hak akses pada lahan atau pemanfaatan lahan, serta kontrol atau manajemen pada lahan. Gambaran kelembagaan penguasaan lahan dan pohon (*land and tree tenure*) ini adalah sebagai berikut.

Tabel 3. Status penguasaan tanah dan pohon di Desa Sigalangan

Variabel	Keterangan
Kepemilikan/ Ownership	<ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan tanah didapat sebagai warisan dari orang tua kepada anak dan dibeli sendiri atau pemberian Mora. • Pembagian harta pusaka berdasarkan agama Islam. • Di Sigalangan pranata adat <i>dalihan na tolu</i> meliputi Mora, Kahanggi dan Anak boru yang berada dalam kepemimpinan Raja Panusunan Bulung (RPB). Disebut Mora (RPB) jika keturunan RPB mengambil istri ke Mora dan jajarannya (pihak istri), harus dihargai penuh dalam tatanan adat/sidang adat. Kahanggi adalah saudara dari RPB dan jajarannya (satu keturunan dengan RPB) marganya sama. Anak boru adalah putri RPB atau kahanggihnya diambil oleh barisan anak boru. • Semua hasil lahan dari anak boru dapat diambil lagi oleh RPB jika ditelantarkan. • Anak boru terdiri dari: Sibuat boru, jika mengambil boru anak RPB, Gorukoppinis: dari namboru RPB/ saudara Bapak yg perempuan, Orang kaya: semenjak dahulu dari RPB, dan Pisang ratut: anak dari anak boru • Di Sigalangan terdapat tanah ulayat RPB 32 000 ha. • Hak kepemilikan tanah diikuti atas hak kepemilikan pada tanaman di atasnya. • Status hak kepemilikan atas lahan kuat, dimana tanah dapat di jual tanpa perlu mendapatkan ijin dari pihak lain.
Pemanfaatan/ use	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan tanah dengan menanam tanaman pertanian dan pohon, pengembalaan, kayu bakar, dan lainnya. • Tanah dapat ditanami dengan segala jenis tanaman. Jenis-jenis tanaman dominan di Sigalangan adalah: Kakao, Kelapa, karet, jati, gmelina, kuweni, mangga, pisang, pepaya, durian, asam, rambutan, langsung, pinang, kemiri. • Tidak ada larangan untuk memanfaatkan lahan, atau hak pemanfaatan dimiliki secara penuh oleh pemilik lahan
Kontrol/ Control	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilik tanah dapat mengeluarkan pengguna lain dari tanah garapannya • Kontrol dilakukan oleh pemilik tanah. • Mora berhak memberi nasehat terhadap konflik tanah, khususnya jika tanah garapan tersebut diberi oleh Mora • Jika terjadi konflik penguasaan tanah tidak dapat diselesaikan ditingkat keluarga, maka dibawa Mora ke Sopo godang (tempat sidang/masyarakat adat RPB). Peserta musyawarah di sopo godang adalah: <i>hatobangun</i>, orang kaya, tokoh agama, cerdik pandai ditambah Raja Panusunan Bulung (RPB), misalnya menyidang pencuri. • Kontrol juga dapat dilakukan oleh <i>Naposo bulung</i>, yaitu: sekelompok pemuda/ pemuda dalam masyarakat yang belum berumah tangga. <i>Tutor poda</i> adalah nasehat adat, diberikan oleh RPB di sopo gadang dalam pesta adat.

Berdasarkan karakteristik kelembagaan penguasaan lahan yang dilihat dari tiga variabel yaitu kepemilikan, akses/ pemanfaatan dan kontrol/ manajemen lahan menunjukkan hak-hak penguasaan lahan secara penuh dimiliki oleh pemilik tanah. Hal ini ditunjukkan oleh totalitas hak-hak pada tanah, termasuk memindahkan hak kepada pihak lain. Status penguasaan lebih banyak ditentukan oleh nilai-

nilai Islam di Sigalangan, dimana tanah diwariskan menurut hukum Islam. Namun dalam kontrol tanah dan pohon menunjukkan peran pranata adat *dalihan na tolu* khususnya dalam mengatasi konflik yang terjadi.

Seperti diketahui konflik tanah seringkali terjadi dalam masyarakat, menyangkut hak-hak penguasaan termasuk pada pohon. Pendekatan mengatasi konflik pada umumnya lebih disukai

menggunakan pendekatan alternatif. Seperti dibuktikan oleh Manalu (2009), dimana masyarakat Batak lebih memilih cara-cara di luar pengadilan dalam memecahkan sengketa yang terjadi. Hal ini lebih disukai karena bersifat *win-win solution*. Pentingnya peran *dalihan na tolu* seperti disebutkan oleh Toruan (2013) bahwa pranata adat *Dalihan Na Tolu* merupakan identitas etnis Batak. Sebagai identitas maka mereka tidak dapat terlepas dari sistem tersebut dimanapun.

Menurut J.C Vergouwen dalam Toruan (2013) *Dalihan Na Tolu* adalah unsur kekerabatan warga masyarakat Batak. Maka setiap sub-etnis Batak memiliki garis penghubung satu sama lain. *Dalihan Na Tolu* dari sisi bahasa berarti tungku yang berkaki tiga, saling menyokong. Di Sigalangan tatanan adat masyarakat dibawah kepemimpinan Raja Panusunan Bulung (RPB), dan dilengkapi oleh *kahanggi* dan *Anak boru* sebagai sistem *dalihan na tolu*. Seperti diketahui karakteristik masyarakat di Sigalangan terikat dengan pranata adat *dalihan na tolu*, dengan unsur unsur *Mora*, *Kahanggi* dan *anak boru*. Walaupun tatanan adat ini antar masyarakat Batak mempunyai penamaan yang beragam, namun memiliki banyak kesamaan. Filosofi Batak *somba marhulu-hula*, *manat mardongan tobu* dan *elek marboru* secara umum mengalami perbedaan tekanan dalam praktiknya sehari-hari, namun mempunyai persamaan dalam hal-hal yang universal.

Di masyarakat Batak Mandailing-Angkola, aturan Islam menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengaturan kehidupan bermasyarakat. Menurut Lubis (2005) Islam dan pranata adat *dalihan na tolu* secara umum menjadi sendi dalam kehidupan mereka. Mayoritas masyarakat Mandailing-Angkola beragama Islam dan menjadikan Islam sebagai aturan dasar mereka, namun menyangkut kebiasaan yang telah dilakukan turun-temurun dalam hubungan kekerabatan berlaku juga adat *dalihan na tolu*. Bahkan dalam memecahkan masalah konflik masyarakat Batak cenderung memakai pendekatan adat tersebut (Manalu, 2009).

Model penguasaan lahan dan pohon di Desa Sigalangan, Tapanuli Selatan dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3. Konsep penguasaan tanah dan pohon di Desa Sigalangan, Tapanuli Selatan

Pada prinsipnya aktifitas masyarakat adat di Sigalangan dalam penguasaan tanah dan pohon ditentukan oleh pranata adat lokal *dalihan na tolu*, terkait pengakuan hak-hak masyarakat pada tanah dan vegetasi di atasnya. Status hak-hak penguasaan yaitu kepemilikan, pemanfaatan dan kontrol yang kuat pada sistem kepemilikan mereka merupakan jaminan dalam pengelolaan usaha taninya. Hal ini dibuktikan ketika terjadi konflik penguasaan, maka pranata adat *dalihan na tolu* sebagai tatanan dalam masyarakat Sigalangan berperan dalam pemecahan masalahnya. Namun dalam hal kontrol pada tanah dan produk di atasnya

KESIMPULAN

1. Walaupun dalam aktifitas pengelolaan pranata adat *dalihan na tolu* kurang berperan, namun pengakuan hak-hak penguasaan di Sigalangan bersumber dari sistem adat tersebut dan nilai-nilai Islam.
2. Pranata adat *dalihan na tolu* umumnya sangat dipentingkan perannya ketika terjadi konflik penguasaan pada tanah dan pohon/vegetasi di atasnya.
3. Pilihan jenis tanaman/ vegetasi di atas tanah yang dikelola terutama bertujuan untuk kepentingan ekonomi, dimana hak-hak perorangan sangat kuat dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I. 2001. Teori dan Praktek Komunalisme. Krisis Ekonomi, Sumber daya lokal, dan respon sosial di Sriharjo Yogyakarta. Dalam Benda-Beckman, F., K.Von Benda-Beckman, dan Julietta Koning (Ed). Sumberdaya Alam dan Jaminan Sosial. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Agrawal, A. 2001. Common Property Institution and Sustainable Governance of Resources. *World Development* Vol. 29 No. 10. pp. 1649-1672. Published by Elsevier Science Ltd. www.elsevier.com/locate/worlddev
- Bruce, J.W. 1998. Review of Tenure Terminology. *Tenure Brief-Land Tenure Center No.1 University of Wisconsin, Madison*. www.wisc.edu
- Dias, H.U. 2003. Analysis of spatial distribution of tree Resources Outside the Forest in Ashanti Region, Ghana. *Thesis in Int. Ins. For Geo-information Science and Earth Observation Enschede, The Netherlands*
- FAO, 2000. Community Forestry Rapid Appraisal of Tree and Land Tenure. *FAO Corporate Document Repository*. www.fao.org
- Harahap, D.T.A. Dalihan Natolu. 2007. <http://rumametmet.com/2007/11/14/dalihan-na-tolu-2>
- Hayami, Y dan V.W. Ruttan. 1984. *Agriculture Development: An International Perspective*. The John Hopkins Press, Baltimore and London
- La Croix, S. 2002. Land Tenure: an Introduction. *Economics Series No. 49, June 2002*.
- Lubis, A.R. 2005. Mandailing Across Border. *Taiwan Journal of southeast Asian Studies*, Vol 2 No. 2, 2005, pp 55-98:
- Manalu, W.S. 2009. Eksistensi penyelesaian sengketa alternatif pada masyarakat Batak Toba (Studi di Kota Medan, 2009. Tesis Sekolah Pasca sarjana USU 2009).
- Meinzen-dick, M. Digregario dan N. McCarthy. 2004. *Methods for Studying Collective Action in Rural Development*. *Capri Working Paper no. 33*. www.capri.cgiar.org
- Ostrom, E. 1999. Self-Governance and Forest Resources. *Center for International Forestry Research (CIFOR) No. 20:1-11*
- Parsadaan Marga Harahap Dohot Anak Boruna. 1993. *Horja, Adat Istiadat Dalihan Na Tolu*. Parsadaan Marga Harahap Dohot Anak Boruna, Jakarta 1993
- Pasandaran, E. 2004. Consequences of Policy Change on Indonesian Irrigation System Management. *Jurnal Litbang Pertanian* 23 (3), 2004 : 82-90
- Siburian, R. 2004. Dalihan Na Tolu dan Kegiatan Ekonomi: Studi Kasus Pada Orang Batak Toba di Porsea. *Tesis S-2 Antropologi Universitas Indonesia*
- Tjondronegoro, S.M.P. 1998. *Keping-keping Sosiologi Pedesaan*. Dirjen Dikti DEPDikbud.
- Toruan, G.L. 2013. Kearifan lokal masyarakat hukum adat mandailing natal dalam pengelolaan tanaman nasional batang gadis, Sumatra Utara <http://gunsalt.blogspot.com/2013/01/kearifan-lokal-masyarakat-hukum-adat.html>
- Tri Martial. 2011. Studi empiris dan implikasi penerapan konsep *tree tenure* di Sumatera Barat. *Jurnal Mimbar* Vol 27 No.2 Desember 2011
- Tri Martial. 2010. Kajian Penguasaan Lahan pada Sistem Agroforestri: Studi kasus di Bahorok, Kabupaten Langkat. *Jurnal Kultura* Vol.11 No. 1 Juni 2010, hal 1746-1756